

IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PADAT KARYA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI KECAMATAN ULUJADI KOTA PALU

Marannu Pongabala^{1*}

¹Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu, Palu, Indonesia

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima:

28-07-2025

Disetujui:

27-08-2025

Dipublikasi:

28-08-2025

Kata Kunci:

*Pemberdayaan Masyarakat;
Padat Karya; Implementasi
Kebijakan*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi program Padat Karya sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tipo, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu. Program ini diinisiasi oleh Pemerintah Kota Palu sebagai respons terhadap tingginya angka pengangguran dan rendahnya daya beli masyarakat pascabencana. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan informan kunci, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini efektif dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga, membuka lapangan kerja sementara, dan membangun kesadaran kolektif dalam menjaga lingkungan. Partisipasi aktif masyarakat, ketepatan sasaran penerima manfaat, dan sinergi antar-pemangku kepentingan menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi. Program ini juga mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, dan perilaku warga. Studi ini merekomendasikan agar program serupa terus dikembangkan dengan memperkuat kapasitas kelembagaan lokal dan melibatkan warga dalam setiap tahap perencanaan hingga evaluasi.

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman, pola pikir masyarakat pun turut mengalami perubahan yang semakin kritis dan dinamis (Ngafifi, 2014). Perubahan ini memunculkan berbagai tantangan baru bagi pemerintah dalam mewujudkan cita-cita nasional, yakni masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah dituntut meningkatkan peranannya dalam setiap kebijakan dan program pembangunan, baik yang bersifat fisik maupun sosial. Tidak hanya itu, pemerintah juga diharapkan mampu merespons perubahan sosial secara adaptif, inovatif, dan inklusif, dengan mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program.

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam konstitusi, antara lain adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka mewujudkan cita-cita tersebut, pemerintah telah menetapkan arah pembangunan nasional secara bertahap, terencana, dan terpadu yang dituangkan dalam berbagai program strategis (Hasan, 2024). Program-program ini tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur semata, tetapi juga mencakup penguatan sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan dan partisipasi aktif warga negara.

Namun demikian, hingga kini kondisi masyarakat Indonesia secara umum masih menghadapi sejumlah ketimpangan, baik dari aspek fisik, ekonomi, maupun sosial. Fenomena kemiskinan, pengangguran, dan keterbelakangan di berbagai daerah masih menjadi tantangan

serius. Tugas ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah yang telah diberi kewenangan melalui otonomi daerah dan tugas pembantuan (Sinurat, 2023). Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah menjadi sangat strategis untuk merancang dan melaksanakan program-program pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan lokal, berbasis potensi wilayah, dan mampu menggerakkan partisipasi masyarakat secara aktif dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan roda pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Melalui berbagai upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dituntut untuk berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan warganya. Keberhasilan pembangunan akan tercapai apabila didukung oleh partisipasi semua pihak, baik unsur suprastruktur (pemerintah) maupun infrastruktur (masyarakat), melalui pelibatan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program pembangunan. Partisipasi ini tidak hanya mencerminkan demokratisasi dalam tata kelola pemerintahan, tetapi juga memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap program yang dijalankan, sehingga mendorong keberlanjutan dan efektivitas pembangunan di tingkat lokal.

Salah satu bentuk konkret kebijakan pemberdayaan masyarakat di Kota Palu adalah implementasi program Padat Karya. Program ini memiliki landasan hukum yang kuat, yakni Peraturan Wali Kota Palu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2021. Tujuan utama dari program ini adalah meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, khususnya di tingkat kelurahan, melalui kegiatan padat karya yang menyerap tenaga kerja lokal. Pendanaan program bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu, yang menandakan komitmen pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara partisipatif dan berkelanjutan dengan melibatkan langsung masyarakat dalam kegiatan pembangunan berbasis lingkungan sekitar.

Konsep pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kini menjadi perbincangan strategis di berbagai forum, baik di kalangan birokrat, politisi, akademisi, maupun masyarakat sipil yang peduli terhadap isu keadilan dan kesejahteraan sosial. Hal ini tidak terlepas dari realitas kegagalan model pembangunan konvensional yang terlalu menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi makro, namun mengabaikan dimensi keadilan distribusi dan keberdayaan masyarakat akar rumput. Ketimpangan sosial dan marginalisasi kelompok rentan menjadi konsekuensi dari pendekatan tersebut. Oleh karena itu, muncul paradigma pembangunan alternatif yang berfokus pada rakyat (*people-centered development*), dengan menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya lokal secara optimal, partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan, serta pemberdayaan sebagai sarana untuk memperkuat kapasitas individu, keluarga, dan komunitas dalam menentukan arah hidup dan kesejahteraan mereka sendiri (Fernandya et al., 2022).

Menurut Mas'oed (dalam Mardikanto, 2010), pemberdayaan pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk memberikan daya atau kekuatan kepada masyarakat agar mereka mampu mengelola kehidupannya secara mandiri dan berkelanjutan. Pandangan ini dipertegas oleh Parsons et al. (dalam Mardikanto, 2010) yang menyatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses di mana setiap individu memperoleh kekuatan yang memadai untuk turut serta dalam mengontrol, memengaruhi, dan menentukan arah kebijakan serta lembaga yang berdampak langsung terhadap kehidupannya. Dengan demikian, pemberdayaan tidak hanya bertumpu pada aspek ekonomi, tetapi juga pada peningkatan keterampilan, pengetahuan, serta akses terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan. Tujuan akhirnya adalah menciptakan masyarakat yang mandiri, berdaya saing, dan berdaya guna dalam menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi.

Pemberdayaan hadir sebagai respons terhadap lemahnya kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi yang dihadapi sebagian masyarakat, yang membuat mereka tidak memiliki kapasitas atau pengetahuan memadai untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam konteks ini,

pemberdayaan tidak sekadar menjadi strategi pembangunan, melainkan menjadi kebutuhan untuk mendorong transformasi sosial dari ketergantungan menuju kemandirian. Tujuan utamanya adalah membangun kapasitas masyarakat, mengubah pola pikir dan perilaku, serta mendorong terbentuknya organisasi sosial yang mampu mengelola potensi lokal secara optimal. Bentuk konkret dari upaya ini antara lain pelatihan keterampilan usaha, pengembangan industri rumah tangga (home industry), serta berbagai kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki masyarakat setempat.

Kota Palu, sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, terdiri atas enam kecamatan: Palu Selatan, Palu Utara, Palu Timur, Palu Barat, Tatanga, dan Ulujadi. Sejak era kepemimpinan Wali Kota Rudi Mastura (2005–2015) hingga dilanjutkan oleh Wali Kota Hadianto Rasyid, upaya pemberdayaan masyarakat melalui program Padat Karya terus mengalami penguatan dan pengembangan. Program ini dirancang berbasis kelurahan dan dilaksanakan di setiap kecamatan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung melalui keterlibatan mereka dalam kegiatan produktif. Untuk menjamin akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaannya, program ini diawasi oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta Tim Pengawas Internal, sehingga potensi penyalahgunaan anggaran dapat dicegah sedini mungkin.

Namun dalam implementasinya, program Padat Karya di Kota Palu masih menghadapi sejumlah kendala yang menghambat tercapainya tujuan secara optimal. Beberapa permasalahan yang muncul antara lain adalah ketidaksesuaian data peserta dengan data kependudukan pada dokumen tanda terima gaji, dominasi peserta dari kalangan perempuan, serta keterlibatan warga yang sudah lanjut usia dalam jumlah yang cukup besar. Kondisi ini mencerminkan adanya tantangan dalam hal akurasi pendataan dan ketepatan sasaran program. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui Padat Karya di Kota Palu, khususnya di Kecamatan Ulujadi. Fokus penelitian diarahkan pada penilaian efektivitas pelaksanaan program serta identifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam proses implementasinya guna memberikan gambaran yang komprehensif tentang capaian dan tantangan program tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam fenomena sosial yang terjadi dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat di Kota Palu.

Menurut Moleong (1990), penelitian kualitatif berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai instrumen utama, menggunakan metode kualitatif, serta menganalisis data secara induktif. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada hasil, serta mengutamakan makna daripada generalisasi.

Sugiyono (2015) menyebutkan bahwa metode kualitatif juga dikenal sebagai metode naturalistik karena dilakukan dalam kondisi alamiah. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, dan digunakan untuk memahami perspektif subjek penelitian secara mendalam.

Dalam konteks ini, desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mendalam tentang individu, kelompok, situasi, atau gejala sosial tertentu secara sistematis (Koentjaraningrat, 1993).

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Tipo, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan kedekatan geografis dengan pusat kecamatan serta adanya program pemberdayaan masyarakat yang berjalan aktif di kelurahan tersebut. Adapun fokus penelitian meliputi:

1. Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat, mencakup:
 - a. Tahapan dan mekanisme pelaksanaan
 - b. Pihak-pihak yang terlibat
 - c. Pengelola dan pengendali dana program
 - d. Realisasi dana dan pelibatan masyarakat di enam kelurahan se-Kecamatan Ulujadi
2. Dampak/hasil implementasi program di enam kelurahan
3. Tantangan pelaksanaan program ke depan

Informan Penelitian

Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu penunjukan informan berdasarkan kriteria tertentu, yaitu mereka yang dianggap memahami dan terlibat langsung dalam pelaksanaan program. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan
1	Nur Alam	Ketua RT.002 RW.05
2	Fadil	Warga
3	Azida	Warga
4	Yulia	Warga
5	Zulfianti	Warga

Definisi Konsep

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu langkah strategis yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelompok dalam masyarakat, agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri, memiliki akses terhadap sumber daya yang tersedia, dan mampu berperan aktif dalam mengendalikan kondisi sosial di sekitarnya (Mardikanto, 2010).

Efektivitas implementasi program pemberdayaan ditentukan oleh sejauh mana proses pelaksanaannya mampu menciptakan suasana partisipatif, memperkuat kapasitas warga, menyediakan sarana dan prasarana pendukung, serta memberikan perlindungan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang rentan (Mardikanto, 2010).

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat secara umum adalah untuk melepaskan masyarakat dari kondisi kemiskinan, mendorong keterlibatan aktif dalam pembangunan, meningkatkan kualitas hidup mereka, dan mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki oleh masyarakat.

Sementara itu, aspek perubahan yang diharapkan dari proses pemberdayaan mencakup transformasi pada sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, perbaikan kondisi sosial dan ekonomi, serta pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan.

Jenis dan Sumber Data

Data primer dikumpulkan melalui pengamatan langsung di lapangan serta wawancara mendalam dengan informan kunci yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung terhadap program yang diteliti. Sementara itu, data sekunder mencakup berbagai sumber tertulis dan dokumentasi, seperti regulasi, laporan kegiatan, arsip foto, serta dokumen resmi lainnya yang berfungsi untuk melengkapi dan menguatkan data primer. Adapun teknik penentuan informan dilakukan melalui purposive sampling, yaitu pemilihan secara sengaja terhadap individu yang dianggap relevan dengan fokus penelitian. Jika selama proses pengumpulan data diperlukan narasumber tambahan, maka metode ini dapat dikembangkan menjadi snowball sampling, yakni dengan meminta rekomendasi dari informan sebelumnya untuk menemukan informan baru yang sesuai.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga metode utama, yaitu:

1. Observasi langsung, yaitu kegiatan pengamatan yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran nyata terkait pelaksanaan program Padat Karya.

2. Wawancara mendalam (in-depth interview), yang dilakukan dengan informan utama guna memperoleh informasi secara komprehensif dan mendalam berdasarkan pengalaman serta pandangan langsung mereka terhadap pelaksanaan program.
3. Studi dokumentasi, yakni pengumpulan data melalui berbagai dokumen pendukung seperti peraturan, laporan kegiatan, foto, serta catatan resmi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan program Padat Karya.

Instrumen Penelitian

Dalam pendekatan penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang terlibat langsung dalam seluruh proses penelitian—mulai dari pengumpulan data, analisis, hingga interpretasi temuan. Untuk menunjang proses pengumpulan data, digunakan beberapa instrumen tambahan, antara lain:

1. Pedoman wawancara, yang berfungsi sebagai alat bantu untuk menjaga alur wawancara tetap fokus dan relevan dengan tujuan penelitian, sekaligus memudahkan eksplorasi informasi dari informan.
2. Perangkat pendukung, seperti buku catatan, alat tulis, serta perangkat elektronik (seperti perekam suara atau ponsel) yang digunakan untuk mendokumentasikan hasil observasi dan wawancara secara akurat.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model dari Miles et al. (2014), yang terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu:

1. Reduksi data (data condensation), yakni proses menyeleksi, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang diperoleh dari lapangan, agar hanya informasi yang relevan dengan fokus penelitian yang dipertahankan.
2. Penyajian data (data display), yaitu tahap menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk naratif, matriks, tabel, atau bagan, sehingga memudahkan peneliti dalam melihat pola dan kecenderungan yang muncul.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti menginterpretasikan data secara menyeluruh untuk mengidentifikasi makna, hubungan antar unsur, serta pola-pola temuan, yang kemudian diverifikasi melalui triangulasi untuk memastikan validitasnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Lokasi Penelitian

Kecamatan Ulujadi merupakan salah satu wilayah administratif yang terletak di bagian barat Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Secara geografis, kecamatan ini berada pada koordinat antara 0°44' hingga 0°47' Lintang Selatan dan 119°52' hingga 119°54' Bujur Timur, dengan luas wilayah mencapai kurang lebih 40,24 kilometer persegi. Ulujadi terbagi atas enam kelurahan, yakni Donggala Kodi, Kabonena, Silae, Tipo, Buluri, dan Watusampu. Seluruh kelurahan tersebut memiliki aksesibilitas yang cukup baik, dapat dijangkau oleh kendaraan roda dua maupun roda empat.

Wilayah ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Donggala di sebelah utara, Teluk Palu dan Kecamatan Palu Barat di bagian timur, Kecamatan Palu Barat serta Kabupaten Sigi di sebelah selatan, dan kembali berbatasan dengan Kabupaten Sigi di bagian barat. Secara topografis, wilayah Kecamatan Ulujadi didominasi oleh dataran rendah yang mencakup sekitar 85 persen dari keseluruhan wilayah, sedangkan sisanya terdiri atas perbukitan sebesar 10 persen dan kawasan pegunungan sebanyak 5 persen. Jenis tanah di wilayah ini pada umumnya adalah lempung berpasir dengan ketinggian rata-rata 23,3 meter di atas permukaan laut. Dari sisi geologi, kawasan ini tergolong rawan bencana, khususnya terhadap potensi tsunami, mengingat posisinya yang dilalui oleh jalur Sesar Palu Koro yang berpotensi aktif dan melewati wilayah Teluk Palu.

Dalam kurun waktu delapan tahun terakhir, jumlah penduduk di Kecamatan Ulujadi menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2016, jumlah penduduk tercatat

sebanyak 27.319 jiwa, dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 35.150 jiwa. Pertumbuhan penduduk ini tersebar di enam kelurahan, dengan peningkatan yang cukup menonjol terutama di Kelurahan Kabonena dan Silae. Kelurahan Tipo sendiri mengalami pertumbuhan dari 3.298 jiwa pada tahun 2016 menjadi 4.316 jiwa pada tahun 2024, menunjukkan tren peningkatan yang cukup stabil.

Dalam konteks pembangunan sosial-ekonomi, pemerintah Kota Palu melalui Dinas Sosial bersama pihak kecamatan sebagai pelaksana teknis di lapangan telah menginisiasi Program Padat Karya sebagai upaya strategis untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan dan berpenghasilan rendah. Visi dari program ini adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, mendorong partisipasi aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi tingkat pengangguran, serta menciptakan lapangan kerja bagi warga kurang mampu. Sementara itu, misi yang diemban dalam pelaksanaan program ini mencakup percepatan pengentasan kemiskinan, pemanfaatan sumber daya lokal, serta pemberian pembekalan kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara profesional dan produktif. Program ini diharapkan tidak hanya mampu menyediakan pekerjaan sementara, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat dalam jangka panjang.

Implementasi Program Padat Karya

Program Padat Karya merupakan salah satu langkah strategis Pemerintah Kota Palu dalam menghadirkan solusi konkret terhadap persoalan pengangguran dan keterbatasan akses ekonomi yang dihadapi sebagian masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang belum sepenuhnya pulih dari dampak bencana alam maupun kondisi sosial-ekonomi yang tidak stabil. Program ini pertama kali digagas dan diimplementasikan secara sistematis pada masa kepemimpinan Wali Kota Palu, Dr. H. Rudi Mastura. Dalam pidato-pidato publiknya, Wali Kota sering menekankan pentingnya "mengembalikan martabat masyarakat melalui kerja yang layak"—dan Padat Karya adalah salah satu manifestasi nyata dari visi tersebut.

Berbeda dengan pendekatan konvensional yang bersifat top-down, di mana program dirancang tanpa melibatkan aspirasi masyarakat, program ini berusaha mengedepankan pendekatan partisipatif atau bottom-up. Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek dari pelaksanaan kegiatan, tetapi sekaligus berperan sebagai subjek yang berkontribusi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Pemerintah hadir sebagai fasilitator yang menyediakan sarana, prasarana, serta dukungan teknis dan administratif, sementara masyarakatlah yang menjalankan aktivitas pokok seperti pembersihan lingkungan, perawatan saluran air, dan perbaikan fasilitas umum sederhana.

Sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi tenaga kerja lokal, pemerintah menetapkan insentif sebesar Rp500.000 per orang per bulan. Jumlah ini memang belum mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga, tetapi dinilai cukup untuk menambah penghasilan keluarga, terutama bagi mereka yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan tetap. Dana tersebut disalurkan secara langsung melalui pos belanja kecamatan, dengan kecamatan berperan sebagai unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan di lapangan. Keterlibatan pemerintah tingkat kecamatan dalam pengelolaan anggaran turut meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan, sekaligus memperpendek jalur birokrasi.

Efektivitas Pelaksanaan Program

Berdasarkan observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan warga di RT 005 RW 02, Kelurahan Tipo, dapat disimpulkan bahwa program Padat Karya telah berjalan sesuai rencana dan menunjukkan capaian yang positif. Warga merespon dengan antusias terhadap kehadiran program ini, terutama karena program ini menawarkan aktivitas produktif dengan jadwal yang fleksibel. Waktu kerja ditetapkan pada pagi hari, antara pukul 06.00 hingga 08.00 WITA, yang memungkinkan peserta untuk melanjutkan aktivitas lain seperti bertani, berdagang, atau mengurus keluarga.

Efektivitas pelaksanaan tidak hanya diukur dari kehadiran fisik para peserta di lapangan, tetapi juga dari kualitas hasil kerja serta perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan. Beberapa wilayah yang sebelumnya sering kali diabaikan, seperti area pekuburan, pinggir jalan utama, dan saluran air yang tertutup semak, kini tampak lebih tertata. Hal ini menjadi bukti bahwa pendekatan pemberdayaan melalui kerja langsung memang dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif dan memperkuat nilai gotong royong yang selama ini menjadi bagian dari budaya masyarakat lokal.

Penilaian terhadap efektivitas program Padat Karya juga diperkuat oleh temuan lapangan melalui wawancara dengan para peserta. Sebagian besar informan menyatakan bahwa program ini mampu meringankan beban ekonomi keluarga, terutama di tengah meningkatnya harga kebutuhan pokok dan terbatasnya lapangan pekerjaan di sektor formal. Insentif yang diterima, meskipun tidak besar, dianggap cukup membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjadi semacam penyangga ekonomi bagi rumah tangga yang tergolong miskin atau rentan secara sosial ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun bersifat sementara, program Padat Karya memiliki dampak langsung terhadap penguatan ketahanan ekonomi masyarakat bawah.

Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menciptakan kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan kapasitas baik individu maupun kelompok. Dalam konteks program Padat Karya di Kota Palu, tujuan tersebut diupayakan melalui dorongan kepada warga untuk memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal secara optimal. Hal ini mencakup kontribusi tenaga dan waktu, pemanfaatan pengetahuan tradisional, serta pengaktifan kembali jaringan sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya bertumpu pada bantuan material, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Pemerintah tidak sekadar menyediakan lapangan kerja melalui program Padat Karya, tetapi juga menyisipkan muatan edukatif yang bersifat sosial. Peserta tidak hanya bekerja membersihkan lingkungan atau melakukan tugas-tugas fisik lainnya, tetapi secara bersamaan mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kebersihan, partisipasi aktif dalam pembangunan, dan nilai-nilai kerja kolektif. Dengan pendekatan ini, Padat Karya tidak berhenti pada aspek transaksional semata (memberi upah untuk pekerjaan), melainkan bersifat transformatif—mendorong perubahan pola pikir masyarakat dari ketergantungan menuju kemandirian.

Manfaat program Padat Karya di Kota Palu dirasakan secara nyata dalam tiga aspek utama. Pertama, program ini berkontribusi terhadap penurunan angka pengangguran, khususnya di kalangan perempuan, lansia yang masih produktif, serta pemuda yang belum memperoleh pekerjaan di sektor formal. Kedua, adanya peningkatan penghasilan rumah tangga berdampak langsung pada akses yang lebih baik terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Ketiga, program ini berhasil menumbuhkan kembali semangat gotong royong dan rasa memiliki terhadap lingkungan, yang selama ini mulai terkikis akibat menguatnya pola hidup individualistik.

Perubahan yang Dirasakan Masyarakat

Mengacu pada teori pemberdayaan dari David C. Korten, keberhasilan suatu program sangat dipengaruhi oleh keselarasan antara desain program, kesiapan organisasi pelaksana, dan karakteristik kelompok sasaran. Jika salah satu dari tiga unsur tersebut tidak terpenuhi, maka program rentan gagal atau hanya menghasilkan dampak sementara. Dalam konteks implementasi Program Padat Karya di Kelurahan Tipo, ketiga elemen ini tampak berjalan selaras.

Desain program sederhana namun adaptif, dengan fokus pada kegiatan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Organisasi pelaksana—dalam hal ini pihak kecamatan dan kelurahan—menunjukkan koordinasi yang baik dengan tokoh masyarakat setempat, termasuk

RT/RW dan tokoh agama. Sementara itu, kelompok sasaran dipilih secara selektif, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, kemampuan bekerja, dan komitmen terhadap program.

Beberapa testimoni warga berikut memperkuat kesimpulan bahwa program ini memang memberikan perubahan nyata:

Bapak Nur Alam, Ketua RT 002 RW 05, menuturkan bahwa masyarakat sangat terbantu dengan adanya program ini. *“Program ini seperti oase di tengah kesulitan. Banyak warga yang tidak punya penghasilan tetap, akhirnya bisa bekerja walau hanya dua jam per hari. Tapi itu sudah sangat membantu,”* ujarnya. Ia menambahkan bahwa ketepatan sasaran dan jadwal kerja yang teratur menjadi kunci keberhasilan program ini.

Ibu Azida, salah satu peserta program, mengungkapkan bahwa lingkungan sekitar kini jauh lebih bersih dibanding sebelum adanya padat karya. Ia juga merasa bangga bisa ikut menjaga kebersihan pekuburan menjelang Ramadan, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dilakukan secara kolektif.

Bapak Fadil menyatakan bahwa lingkungan yang dulunya kumuh dan penuh sampah kini telah berubah wajah. *“Saya tidak hanya bekerja, tapi merasa ikut membangun kampung sendiri,”* ucapnya.

Ibu Zulfianti mengungkapkan rasa syukur atas program ini. Ia sebelumnya tidak memiliki pekerjaan tetap, namun kini merasa lebih tenang karena bisa membantu ekonomi rumah tangga. *“Uang Rp500.000 itu memang kecil, tapi besar artinya buat kami,”* katanya.

Ibu Yulia, yang juga menjadi peserta program, menilai bahwa Padat Karya berhasil membuka lapangan kerja informal yang sehat dan bermartabat. *“Kami tidak merasa diberi bantuan, tapi diberi kesempatan,”* ujarnya penuh haru.

Dari keseluruhan penjabaran, dapat disimpulkan bahwa program Padat Karya di Kota Palu tidak hanya berkontribusi dalam mengurangi beban ekonomi masyarakat, tetapi juga membentuk kesadaran sosial dan memperkuat partisipasi warga dalam pembangunan lingkungan. Program ini telah memberikan manfaat nyata dalam menurunkan angka pengangguran, meningkatkan penghasilan rumah tangga, serta membangkitkan kembali nilai gotong royong yang mulai memudar. Dengan pendekatan yang bersifat transformatif, Padat Karya tidak hanya menghadirkan pekerjaan sementara, tetapi juga mendorong kemandirian dan ketangguhan masyarakat. Ini sejalan dengan tujuan jangka panjang pemberdayaan masyarakat, yakni menciptakan warga yang aktif, produktif, dan sadar akan perannya dalam pembangunan daerah.

KESIMPULAN

Program Padat Karya yang diimplementasikan di Kelurahan Tipo, Kecamatan Ulujadi, terbukti menjadi salah satu strategi pemberdayaan masyarakat yang efektif dalam menekan angka pengangguran, meningkatkan pendapatan rumah tangga, dan mendorong partisipasi aktif warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Program ini tidak hanya menjawab persoalan ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek sosial seperti semangat gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan.

Transformasi pendekatan dari top-down ke bottom-up menjadikan warga sebagai aktor utama dalam pembangunan, sementara pemerintah bertindak sebagai fasilitator. Efektivitas pelaksanaan tercermin dari partisipasi aktif warga, keteraturan jadwal kerja, serta pemilihan peserta yang tepat sasaran. Keberhasilan program juga ditandai oleh adanya perubahan perilaku dan kondisi lingkungan yang lebih bersih, tertib, dan sehat.

Dengan dukungan kelembagaan yang kuat, alokasi anggaran yang memadai, serta pengawasan yang baik dari pihak kecamatan, implementasi program ini dapat dijadikan model dalam pengembangan kebijakan serupa di wilayah lain. Program ini juga memperlihatkan bahwa

intervensi pemerintah yang bersifat partisipatif mampu menghasilkan dampak yang berkelanjutan dan langsung dirasakan oleh masyarakat..

REFERENSI

- Fernandya, S., Yuwono, T., & Al-Firdaus, L. K. (2022). Pengentasan Masalah Sosial Melalui People Centered Development Guna Memaksimalkan Pembangunan di Indonesia. *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 12(1), 121-132. <https://doi.org/10.33366/rfr.v12i1.3324>
- Hasan, R. (2024). Dinamika Konsep Welfare State di Indonesia: Antara Janji Konstitusi Dan Kenyataan Ekonomi. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10), 1-19.
- Koentjaraningrat, K. (1993). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia.
- Mardikanto, T. (2010). *Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. UNS Press.
- Miles, M. B, Huberman, A. M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications.
- Moleong, L. J. (1990). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Ngafifi, M. (2014). Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 2(1), 33-47.
- Sinurat, R. P. P. (2023). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Registratie*, 5(2), 87-103.
- Sugiyono, S. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta.
- Peraturan Wali Kota Palu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.